

2022

Minggu ke-2 Juni
(10 s.d. 16 Juni 2022)

Isu Sepekan

Bidang Kesra, Komisi IX



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MASUKNYA SUBVARIAN BARU COVID-19 KE INDONESIA

Efendi

Analis Kebijakan Muda
efendi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah telah mengonfirmasi bahwa varian baru virus penyebab Covid-19 yaitu omicron subvarian BA.4 dan BA.5 telah masuk ke Indonesia. Varian baru tersebut telah teridentifikasi dari 4 kasus Covid-19 di Provinsi Bali sejak tanggal 9 Juni 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3 orang merupakan warga negara asing yang berasal dari Amerika, Brazil, dan Mauritius. Sedangkan satu orang lagi merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Keempat orang tersebut berasal dari klaster *Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction* (GPDRR) yang berlangsung di Provinsi Bali pada tanggal 23 hingga 28 Mei 2022. Subvarian BA.4 dan BA.5 merupakan turunan serupa dengan virus omicron subvarian BA.1 dan BA.2. Berdasarkan hasil penelitian di Afrika Selatan, subvarian BA.2 dapat menginfeksi lebih banyak dan lebih menular, bahkan pada orang yang telah divaksin.

Saat ini, aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya kenaikan kasus aktif Covid-19. Namun demikian, Pemerintah menganggap bahwa masuk dan menyebarnya kasus Covid-19 saat ini masih cukup terkendali. Hal ini didasarkan pada data *positivity rate* atau perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan. Saat ini, *positivity rate* masih pada kisaran 1,15% atau di bawah standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO) sebesar 5%. Demikian halnya dengan laju transmisi penyebaran masih di angka 1,03% per 100.000 penduduk per minggu. Kondisi ini juga masih berada di bawah standar WHO yakni 20 per 100.000 penduduk per minggu. Selain itu, tren keterisian tempat tidur atau *bed occupancy ratio* di rumah sakit masih berada di bawah 3% dan tren kematian mingguan masih menunjukkan penurunan.

Meskipun demikian, Pemerintah terus mengevaluasi pelonggaran penggunaan masker di luar ruang terbuka dan memitigasi kenaikan yang mungkin akan terjadi. Penerapan pelonggaran penggunaan masker tergantung pada kondisi penularan Covid-19. Apabila terjadi lonjakan kasus Covid-19, maka penggunaan masker akan kembali diperketat. Meski demikian, upaya sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat patuh untuk tetap menggunakan masker di luar ruang terbuka. Upaya sosialisasi ini seiring dengan penerapan kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 1 yang berlangsung selama satu bulan ke depan dan upaya menggencarkan vaksinasi Covid-19 terutama dosis penguat atau booster.

2022

Minggu ke-2 Juni
(10 s.d. 16 Juni 2022)

Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi IX

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

LAYOUTER



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Ari Mulianta Ginting
Venti Eka Satya
Rafika Sari

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

Atensi DPR

Penurunan penyebaran Covid-19 saat ini merupakan prestasi yang cukup baik sebagai upaya bersama antara Pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dan semua *stakeholder* lainnya dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun demikian, dengan masuknya subvarian omicron penyebab Covid-19 yaitu BA.4 dan BA.5 ke Indonesia, merupakan tantangan baru di saat pemerintah memberlakukan penerapan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka. Oleh karenanya, Komisi IX DPR RI perlu memastikan Pemerintah untuk tetap menyosialisasikan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Selain itu, Komisi IX DPR RI juga perlu meminta Pemerintah untuk mewajibkan vaksinasi Covid-19 *booster* pada masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat telah mendapat perlindungan yang cukup optimal di saat diberlakukannya kebijakan pelonggaran protokol kesehatan.

Sumber

Bisnis Indonesia, 11 Juni 2022;
Kompas, 11 & 14 Juni 2022;
Media Indonesia, 11 & 14 Juni 2022;
Republika, 11 Juni 2022.